

IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE TOURISM* DALAM *ASEAN TOURISM*

STRATEGIC PLAN (ATSP) DI WISATA BAHARI INDONESIA

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SUCI SULISTIAWATI

18323164

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021/2022

IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE TOURISM* DALAM *ASEAN TOURISM*

STRATEGIC PLAN (ATSP) DI WISATA BAHARI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SUCI SULISTIAWATI

18323164

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE TOURISM DALAM ASEAN
TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) DI WISATA BAHARI
INDONESIA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

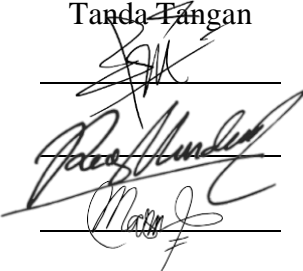



Hangga Fathana, S .IP., B.Int.St.,M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

30 Mei 2022,

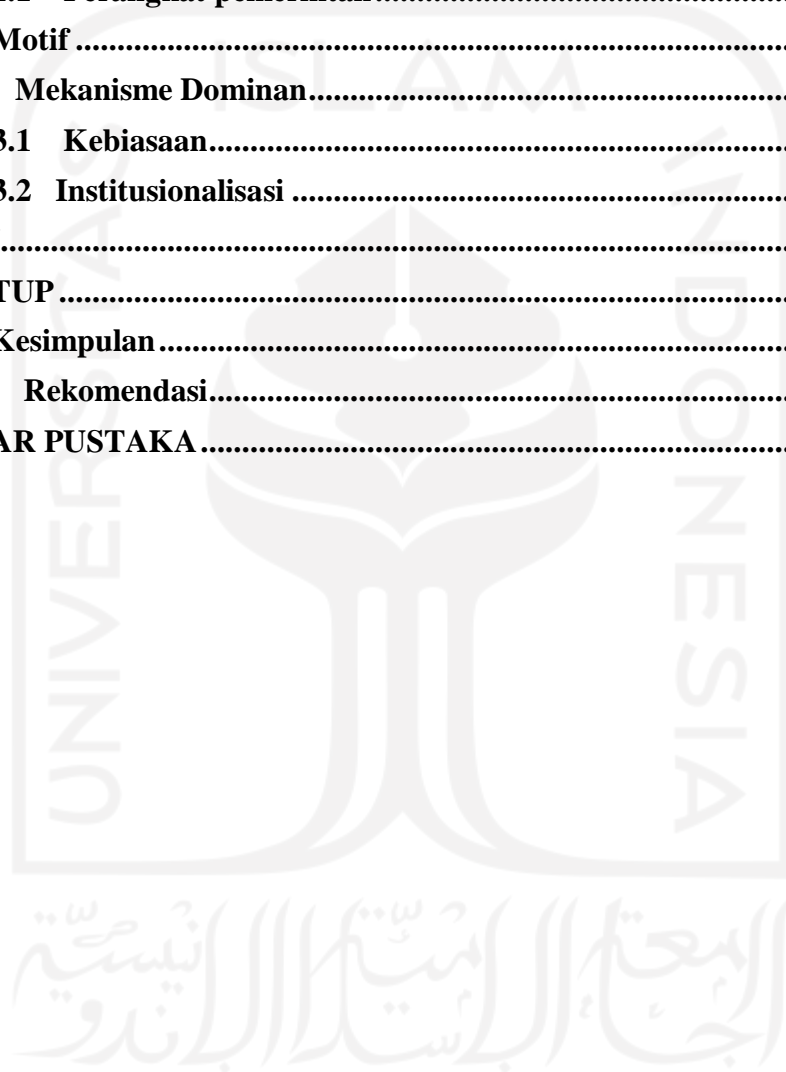


Suci Sulistiawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Cakupan penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
ANALISIS NORM EMERGENCE.....	18
2.1. Aktor	18
2.2 Motif	19
2.3 Mekanisme Dominan	21
BAB III.....	26
ANALISIS NORM CASCADE	26
3.1 Aktor.....	26
3.1.1 Organisasi Internasional ASEAN	26
3.1.2 Pemerintah Indonesia.....	27
3.3 Motif	27

3.3 Mekanisme Dominan.....	27
3.2.1 Sosialisasi	29
3.2.2 Institusionalisasi	31
BAB IV	39
ANALISIS NORM INTERNALIZATION PADA IMPLEMENTASI SUSTAINABLE TOURISM DI WISATA BAHARI INDONESIA	39
4.1 Aktor.....	39
4.1.1 Perangkat pemerintah.....	39
4.2 Motif	41
4.3 Mekanisme Dominan.....	42
4.3.1 Kebiasaan.....	42
4.3.2 Institusionalisasi	44
BAB V.....	49
PENUTUP	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2 Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Stage of Norm Sumber	13
Tabel 2. Peningkatan Aksesibilitas	34
Tabel 3. Hasil Analisis	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Arah Strategi dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan* 23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah sudah lebih dari enam dekade merdeka, Indonesia baru memulai secara strategis merencanakan pembangunan pariwisatanya sekitar 40 tahun yang lalu. Sementara pada tahap awal perkembangan tersendat pada tahun 1970-an oleh hambatan kebijakan internal, penyesuaian nilai tukar mata uang yang dipacu oleh boom minyak bumi, dan biaya yang tinggi bagi wisatawan mancanegara dibandingkan dengan mengunjungi destinasi di negara lain, pada tahun 1980 Indonesia menerima 562.000 pengunjung internasional. Tiga puluh tahun kemudian Indonesia menyambut 7 juta pengunjung internasional pada tahun 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berharap meningkatkan angka tersebut dengan target 10 juta kedatangan (Indonesia K. P., 2012).

Karena pariwisata internasional dan domestik tumbuh terus, maka akan terjadi tekanan yang lebih besar pada apa yang dalam beberapa kasus sudah menjadi ancaman terhadap lingkungan alam dan budaya yang rentan. Hal ini menempatkan kebutuhan peningkatan kesadaran dan praktek pariwisata berkelanjutan oleh industri dan juga wisatawan sebagai masalah yang mendesak (Indonesia K. P., 2012).

Seperti yang telah tertulis dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar, 2018) bahwasanya, sektor pariwisata mempunyai tempat strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki banyak aset kepariwisataan yang berpotensi untuk

dikembangkan, sehingga membuat sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi negara. Pada dasarnya Perekonomian nasional tidak bisa bergantung pada sektor minyak dan gas sebagai pilar dalam peningkatan devisa negara karena, cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan akan mengalami krisis. Oleh karena itu, sektor pariwisata bisa membantu meringankan keadaan industri yang lemah dan menghambat terjadinya krisis ekonomi pada suatu negara. Sektor pariwisata merupakan jaring pengaman bagi negara-negara untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. (Katja, n.d.)

Saat ini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadikan sustainable tourism sebagai fokus utama dalam pengembangan pariwisata di bandingkan dengan mengejar jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia. Dalam proses pengembangan *sustainable tourism*, Badan Pariwisata Kreatif mengelola pariwisata berkelanjutan dengan berlandaskan empat pilar utama diantaranya, ekonomi berkelanjutan, keberlanjutan budaya, pengelolaan berkelanjutan dan aspek lingkungan.(kemenparekraf, 2020).

Akan tetapi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Dimana pada tahun 2007 *The World Economic Forum* (WEF) mengeluarkan sebuah data indeks daya saing pariwisata dunia yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 60, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara ASEAN, seperti Singapura yang menempati peringkat ke 8 dunia, Malaysia pada peringkat ke 31 dan Thailand pada peringkat ke 43 (Sunario, 2007). Dari uraian data diatas, terlihat bahwa dalam konteks indeks daya saing di tingkat kawasan ASEAN, Negara Indonesia berada diposisi jauh

dibawah Negara singapura, Malaysia, dan Thailand. Indeks daya saing pariwisata dunia yang dirilis oleh *The World Economic Forum* (WEF) dinilai tidak hanya didasarkan pada keindahan objek pariwisata dan budaya yang dimiliki oleh sebuah Negara, melainkan terdapat 13 komponen penilaian yang menjadi pola dalam melihat indeks daya saing pariwisata di setiap Negara. Komponen yang dimaksud adalah peraturan, perundangan dan kebijakan yang memelihara dan mengembangkan pariwisata dan perjalanan wisatawan, keamanan destinasi, kebijakan lingkungan hidup, kebersihan, kesehatan, ketentuan travel dan tourism sebagai sebuah prioritas pembangunan, pengembangan infrastruktur perhubungan Udara, infrastruktur teknologi Informasi, infrastruktur pariwisata, daya saing harga, pandangan nasional terhadap pariwisata, serta sumber daya alam dan budaya (Kurniawan, 2013).

Melihat Indeks daya saing yang telah dikeluarkan oleh WEF, peneliti mendapatkan sebuah data yang membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Dimana Negara Malaysia memiliki delapan keunggulan dalam komponen penilaian yang ditentukan oleh WEF, Sedangkan Negara Indonesia hanya memenuhi empat komponen saja, (News, 2012). Indonesia tidak hanya dikalahkan dalam hal indeks daya saing pariwisata. Namun Indonesia juga kalah dalam jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dan datang ke Indonesia. Kita bisa melihat bahwa Singapura dan Indonesia mempunyai produk dan konsep pariwisata yang sangat berbeda. Jika Negara Singapura mengarahkan kepada objek wisata buatan yang dikemas dalam bentuk modern seperti halnya patung singa (merlion), Universal Studio, Orchard Road, Marina Bay Sands dan lain sebagainya. Namun Negara Indonesia lebih berfokus pada pariwisata alam yang masih sangat alami dan asri.

Hal yang menyebabkan Singapura menjadi pilihan utama bagi para wisatawan asing adalah keadaan Negara yang sangat bersih sehingga memberikan kenyamanan pada wisatawan asing untuk datang berkunjung ke Singapura. Dalam konteks regional ASEAN, selain Singapura dan Malaysia, Negara Thailand juga menjadi salah satu destinasi yang banyak dipilih oleh para wisatawan asing untuk didatangi. Jika Negara singapura dan Malaysia berfokus pada objek wisata yang real, seperti gedung-gedungan dan kondisi alam , namun berbeda dengan Thailand yang menawarkan pariwisata budaya dan keindahan alamnya . Dapat dilihat dari penjabaran diatas, bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih harus ditingkatkan dan diarahkan lagi, sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana Implementasi Sustainable Tourism dalam ASEAN Tourism Strategic Plan di wisata bahari Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *Sustainable Tourism* dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan* pada pengembangan wisata bahari Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana proses implementasi *Sustainable Tourism* dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan* di wisata bahari Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia melakukan pengembangan dalam sektor pariwisata dengan menggunakan konsep *Sustainable Tourism* pada wisata bahari Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini yaitu Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peningkatan penerapan *Sustainable Tourism* di wisata bahari Indonesia. Dimana penulis ingin menganalisis tahapan Implementasi *Sustainable Tourism* dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan* di wisata bahari Indonesia. Pada penelitian kali ini, penulis akan berfokus pada tahun 2016-2021, dimana diketahui pada tahun sebelumnya pemerintah Indonesia dianggap kurang meningkatkan perkembangan pariwisata, hal ini dapat dilihat dari anggaran yang dikeluarkan untuk mempromosikan wisata Indonesia sebesar 3,67 triliun yang masih terbilang sangat kurang dibandingkan dengan tahun 2016, dimana sektor pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7,87 Triliun (Pernando, 2015) hal tersebut bisa menjadi indikasi awal dalam melihat bagaimana pariwisata menjadi sektor penting bagi negara Indonesia

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dini Septyana Rahayu & Dewi Sulistyawati dengan judul Implikasi *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025* dalam Pengembangan Proyek *Ten New Bali's Indonesia*, tahun 2021, Dauliyah *Journal of Islamic International Affairs*, Vol 6, Nomor 2, Halaman 249-227 (Dini Septyana Rahayu, 2021) Penelitian ini membahas tentang *ASEAN Tourism Strategic Plan* terhadap perkembangan pariwisata negara ASEAN, yaitu Indonesia dan *Ten New Bali's Indonesia*. Penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengembangan *project Ten New Bali's* dikarenakan adanya perubahan pada rezim pariwisata internasional yang disebut ATSP II, yang berbasis *sustainable tourism*. Pengembangan *project*

Ten New Bali's dapat menunjang perekonomian negara dengan menjadikan pariwisata sebagai penyumbang devisa negara. Hal yang menjadi perbedaan penulis terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan *project Ten New Bali's* yang dikemukakan Indonesia untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Maka tulisan ini akan mengisi kekurangan tersebut, dengan berfokus pada Implementasi *Sustainable Tourism* yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan pada pariwisata sebagai bentuk respon dari *ASEAN Tourism Strategic Plan*.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Stephanie Andriani Moi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Rangka *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015 Terhadap Pengelolaan Pariwisata di Labuan Bajo*, dalam *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Tahun 2017, Vol 6, Nomor 2*, Halaman 123-13 (Moi, 2017). Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk Implementasi dari ATSP 2011-2015 yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada Pariwisata di Labuan Bajo. Hasil dari penelitian ini bahwa kepatuhan Indonesia pada arahan strategi ATSP 2011-2015 dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Menghasilkan tingkat efektifitas yang kurang signifikan dikarenakan, beberapa kendala akibat kondisi pariwisata yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan konsep *Compliance* (Kepatuhan). Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian penulis terdahulu pada fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu adalah mengenai kepatuhan Labuan Bajo Indonesia, sebagai anggota ASEAN dan bagian dari ATSP 2011-2015. Sedangkan penelitian ini akan melanjutkan penelitian terkait pengembangan rencana strategis pariwisata ASEAN dalam ATSP

II yang berfokus dalam Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan* dalam penerapan *Sustainable Tourism*.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Lady Amalia DAP dengan judul Efektivitas *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015* di Indonesia dalam *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vo 15, Nomor 2, Tahun 2016. (DAP, 2016) yang mana penelitian ini, menjelaskan bagaimana ASEAN berperan dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* untuk meningkatkan industri pariwisata pada tahun 2014-2016. Penelitian ini mengkaji peningkatan secara signifikan program pemerintah Indonesia, dalam mengimplementasikan ATSP dengan perkembangan wisata Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah ATSP 2011-2015 tidak efektif diterapkan dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah, fokus penelitian. Penelitian terdahulu menganalisis Tingkat Efektivitas dari ASEAN melalui ATSP untuk meningkatkan perkembangan industri pariwisata. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis bagaimana Indonesia menerapkan *Sustainable Tourism* untuk meningkatkan pariwisata pasca ATSP 2016-2025.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Haiyyu Darman Moenir & Abdul Halim dengan judul Implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* dalam kebijakan pariwisata Bahari Indonesia, dalam *Journal Power in International Relation* Volume 4, Nomor 2, Halaman 166-189, Tahun 2020 (Haiyyu Darman Moenir, 2020). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi Rencana Strategi Pariwisata ASEAN (ATSP) dalam kebijakan Indonesia terkait pariwisata Bahari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum memaksimalkan wisata bahari yang berpotensi besar dalam sektor pariwisata

Indonesia. Perbedaan penulis terdahulu terletak pada isu pembahasan. Di mana penelitian terdahulu mengangkat wisata bahari sebagai potensi yang bisa dikembangkan dengan sarana pengimplementasian ATSP, sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada *Sustainable Tourism* sebagai bentuk Implementasi dari ATSP di Indonesia.

Penelitian yang kelima ialah, ditulis oleh Haiyyu Darman Moenir, Abdul Halim, Ajeng Masna, Rifamida Maharani dengan judul Implementasi ASEAN *Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015* dalam pengembangan Pariwisata Sumatera Barat , *jurnal kepariwisataan Indonesia* , Vol 15, Nomor 1, Tahun 2021, Halaman 49-63. (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2021) Penelitian ini mencoba menjelaskan atau mengkaji bagaimana, Sumatra Barat memaksimalkan potensi pariwisata melalui penerapan ATSP. Hasil dari penelitian ini ialah rezim internasional ATSP memberikan dampak yang cukup dalam perkembangan wisata di Indonesia ,dikarenakan tidak adanya *sinkronisasi* antara permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan regulasi yang dibentuk oleh ATSP di mana pemerintah Sumatera Barat belum memaksimalkan potensi daerah di bidang pariwisata dan belum menerapkan ATSP secara menyeluruh. Perbedaan penulis terdahulu dan sekarang ialah, terletak pada konsep penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih melihat peran ATSP dalam perkembangan pariwisata Indonesia pada kesuksesan Indonesia dalam mengimplementasikan ATSP, sedangkan penelitian sekarang lebih kepada melihat ATSP sebagai sebuah rezim internasional yang mampu memberikan arahan dalam perkembangan wisata Indonesia yang lebih memperhatikan konsep wisata yang berkelanjutan.

Secara Umum dapat kita lihat bahwa, penelitian-penelitian terdahulu menjadikan ATSP sebagai sebuah Rezim Internasional yang mampu mempengaruhi kebijakan yang ada di suatu negara. Penelitian terdahulu terbagi dalam dua kelompok dimana ada kelompok yang setuju dalam mengimplementasikan ATSP di Indonesia karena dilihat mampu meningkatkan efektivitas daya saing pariwisata dan sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan wisata bahari yang efisien sedangkan kelompok kedua terdiri dari mereka yang tidak setuju dengan pengimplementasian ATSP di Indonesia karena tidak cukup memberikan dampak baik dalam perkembangan wisata bahari. Oleh karena itu penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu dimana penelitian kali ini akan menjelaskan bagaimana proses pengimplementasian *ASEAN Tourism Strategic Plan* dengan menerapkan Konsep *Sustainable Tourism* di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Rezim Internasional ATSP, demi mencapai kesejahteraan wisata bahari, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas wisata bahari yang tetap memperhatikan konsep keberlanjutan. Namun secara khusus perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah, peneliti ingin mencoba membahas Implementasi *Sustainable Tourism* dalam ATSP di wisata bahari Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo di tahun 2016-2021 yang akan diteliti melalui konsep norma internalisasi, dimana peneliti merasa penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep *Stage of norms*

Konsep yang akan digunakan pada penelitian ini adalah konsep *Stage of norms* milik Martha Finnemore and Kathryn Sikkink melalui tulisannya yang

berjudul *International Norm Dynamics and Political Change* (Sikkink M. F., 1998). dalam teori norma terdapat tahapan terbentuknya norma yaitu yang pertama adalah *norm emergence* pada siklus ini akan menganalisis bagaimana norma bisa terbentuk dalam tatanan masyarakat, selanjutnya adalah *norm cascades* dimana norma ini akan melihat bagaimana suatu norma pertama kali disosialisasikan melalui narasi-narasi internasional, dan yang terakhir adalah *norm internalization*.

1. Pada tahapan awal yaitu Tahap Kemunculan (Norm Emergence) merupakan tahap kemunculan suatu isu yang diangkat oleh yang disebut sebagai norm entrepreneurs. Norm entrepreneurs disini adalah organisasi internasional dan individu yang mana Norm entrepreneurs secara persuasif berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma yang dibawanya, Norm entrepreneurs berperan dalam mengkategorikan suatu gagasan norma merupakan nilai yang benar atau salah. Norm entrepreneurs dalam tahapan penyebaran akan membingkai isu yang diusungnya agar diterima oleh masyarakat luas, Pembingkaiian ini akan menggunakan medium bahasa yang sesuai untuk mempengaruhi opini masyarakat, melalui hal ini gagasan yang sebelumnya tidak populer atau tidak dikenal di masyarakat akan disadari kepentingannya oleh masyarakat itu sendiri. Target utama norm entrepreneurs adalah aktor pembuat kebijakan, dimana tujuan utama mereka adalah mempengaruhi mereka untuk membuat suatu produk kebijakan yang diketahui bahwa Ideasional dan komitmen adalah motif yang paling utama dalam tahapan ini, karena norm entrepreneurs percaya bahwa tujuan atau cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma atau gagasan yang disuarakannya adalah gagasan yang benar (Sikkink M. F., 1998).

2. Tahapan selanjutnya adalah tahap Norm Cascade, selanjutnya Peer Pressure yang telah dilakukan oleh norm entrepreneurs membuat negara ikut ambil peran dalam isu yang norm entrepreneurs. Motif yang mendasari adanya keterlibatan organisasi internasional dalam isu yang disebarkan adalah legitimation, reputation dan esteem. Organisasi Internasional sendiri dalam hal ini merupakan badan yang memiliki legitimasi yang kuat. Organisasi Internasional adalah merupakan approval dan disapproval atau pemegang segel persetujuan dan ketidaksetujuan secara internasional (Sikkink M. F., 1998).
3. Dalam konsep norm internalization diketahui bahwa pada tahapan ini negara sudah tidak mempertanyakan lagi legitimasi norma yang diadopsi, dan pada tahapan ini negara membuat sebuah produk kebijakan dari norma yang diadopsi yang kemudian diterapkan agar menjadi sebuah kebiasaan, dimana dalam kasus ini Sustainable tourism sebagai alat internalisasi norma Asean Tourism Strategic Plan saat itu (Sikkink M. F., 1998).
4. Akan tetapi pada tahap internalization tahapan yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini, aktor bukan hanya individu, aktor merupakan agen internalisasi, yang mana pada tahapan ini pemerintah telah melegitimasi norma yang diadopsi dan membuat produk kebijakan sehingga dalam tahapan ini aktor yang berperan adalah profesional, hukum dan birokrasi dimana ketiganya akan menginternalisasikan norma yang bertujuan untuk mencapai conformity norma yang diadopsi (Sikkink M. F., 1998).

5. Saat norm cascades berada di posisi tertinggi, norma lebih mudah diterima secara luas sehingga aktor akan lebih mudah untuk menginternalisasikan suatu norma dalam masyarakat, karena dalam hal ini norma telah disosialisasikan dengan baik melalui narasi-narasi internasional pada awal pengenalannya di suatu negara. Selain aktor motif dan mekanisme dominan juga cukup berperan penting dalam internalisasi norma, dalam hal ini motif adalah conformity yang mana menjadi hal yang cukup penting, motif melihat kesesuaian atau keselarasan dalam internalisasi norma, karena setiap norma sendiri memiliki standar kesesuaian dan standar penilaian masing-masing, selain itu kesesuaian juga diambil dari penilaian masyarakat dan komunitas masyarakat (Sikkink M. F., 1998). Sedangkan mekanisme dominan dapat berupa kebiasaan dan Institutionalisation, pada tahap ini norma yang ada akan diinstitutionalised agar menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat (Sikkink M. F., 1998).

Tabel 1. Stage Of Norms

	<i>Stage 1 : Norms emergence</i>	<i>Stage 2 : Norm cascade</i>	<i>Stage 3 : Norm Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	State, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber : (Sikkink M. F., 1998)

Apabila kita melihat dalam permasalahan ini diketahui bahwa Indonesia dengan kebijakan pengimplementasian Sustainable Tourism dalam ASEAN Tourism Strategic Plan memiliki tahapan dalam mengimplementasikan norma yang diadopsi, dalam hal ini aktor yang berperan penting salah satunya adalah pemerintah, organisasi internasional, selain itu pemerintah dibantu juga dengan pihak individu, namun apabila kita melihat bahwa kebijakan pada Implementasi Sustainable Tourism dalam ATSP sebagai sebuah strategi yang dibentuk oleh Organisasi Internasional ASEAN Tourism Forum yang kemudian menjadi sebuah rujukan dalam pembentukan kebijakan pariwisata berkelanjutan, maka dari itu Internalisasi norma yang baik sangat diperlukan dalam penerapan kebijakan ini.

1.7 Argumen Sementara

Indonesia Merupakan salah satu Negara yang menerapkan konsep Sustainable Tourism dalam pengembangan destinasi wisatanya, dikarenakan terjadinya perubahan dalam rezim Internasional yang berbasis pada Sustainable Tourism dan juga diadaptasi oleh Negara-negara ASEAN. Rezim Internasional ini terdapat pada ASEAN Tourism Strategic Plan ATSP 2016-2025, yang merupakan berupa arahan strategi pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di negara-negara ASEAN.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi dan merespon adanya rezim pariwisata internasional yaitu ATSP 2016-2025 sebagai landasan dalam kebijakan pemerintahan pada pengembangan pariwisata. Dalam menyikapi rezim pariwisata di kawasan ASEAN, Indonesia mengambil kebijakan dengan melakukan perkembangan wisata Bahari yang menerapkan konsep *Sustainable Tourism*. Maka dari Hasil sementara ini adalah, Indonesia mengimplementasikan Sustainable Tourism dalam ASEAN Tourism Strategic Plan sampai pada tahap ke 2 yaitu norm cascade dengan pembentukan beberapa kebijakan yang digagas sesuai dengan strategi yang digunakan dalam ASEAN Tourism Strategic plan yang meningkatkan daya saing pariwisata dengan memperhatikan aspek inklusif dan berkelanjutan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran tentang suatu situasi sosial dan menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Penelitian

deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data seperti: *survey*, penelitian secara tidak langsung, analisis jurnal dan buku (cetak maupun non cetak). (Neuman, 2014)

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah negara. Negara tersebut adalah negara Indonesia di mana, negara Indonesia ikut meratifikasi ATSP dan berperan dalam mengimplementasikan ATSP terhadap kebijakan pariwisatanya dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan taraf pariwisata di Indonesia. Sedangkan, objek penelitian ini adalah Implementasi kebijakan *Sustainable Tourism* di Indonesia sebagai respon dari *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sejumlah dokumen resmi yakni ASEAN, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, jurnal ilmiah, serta artikel dari website resmi dan surat kabar.

1.8.4 Proses Penelitian

Pra-Pendahuluan

Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berasal dari buku dan jurnal untuk memberikan informasi dan penguatan terhadap pembahasan yang akan diteliti.

Pengolahan Data

Penelitian ini tidak langsung turun lapangan, namun melakukan analisa dan mengambil data yang telah didapatkan dari sumber yang *kredibel* terpublikasikan.

Analisis Data

Data tersebut akan melalui tahap analisis untuk memberikan pemetaan dan keterkaitan dengan pembahasan utama yang akan diteliti.

Kesimpulan Akhir

Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap pembahasan utama yang telah melalui proses penganalisaan data.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pernyataan masalah sehingga penulis mengambil tema dan judul seperti yang tertera di bagian sampul. Dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: ANALISIS NORM EMERGENCE

Pada bab ini penulis Melakukan Analisis bagaimana sebuah UNWTO sebagai organisasi Internasional membentuk sebuah norma yang mempengaruhi terhadap pembuatan norma *Sustainable Tourism* dalam ASEAN Tourism Strategic Plan menggunakan konsep norm emergence.

BAB III: ANALISIS NORM CASCADE

Pada bab ini penulis melakukan analisis bagaimana sebuah negara Indonesia menerapkan kebijakan yang mengadopsi norma ASEAN Tourism Strategic Plan menggunakan konsep norm cascade.

BAB IV: ANALISIS NORM INTERNALIZATION

Pada bab ini penulis melakukan Analisis terhadap Implementasi Sustainable Tourism dalam ASEAN Tourism Strategic Plan di wisata bahari Indonesia menggunakan Norm Internalization

Bab V: KESIMPULAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dikaji.

Dengan demikian, kerangka pembahasan diatas akan menjadi acuan penulis untuk menemukan hasil penelitian ini.



BAB II

ANALISIS NORM EMERGENCE

2.1. Aktor

Aktor yang terlibat dalam norm emergence adalah seorang norm entrepreneur yang mana norm entrepreneur akan melakukan kerjasama dengan organisasi internasionalnya untuk menciptakan dan mempromosikan norma, yang mana norm entrepreneur akan mempromosikan norma secara persuasif, norm entrepreneur akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat dunia terhadap gagasan-gagasan yang dimilikinya.

Diketahui bahwa *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) merupakan Lembaga internasional yang bertujuan untuk membangun serta meningkatkan sektor pariwisata sebagai kontributor dalam pembangunan ekonomi. Namun dulu UNWTO merupakan lembaga non-pemerintah, dimana organisasi ini memanfaatkan pariwisata sebagai bagian dari perdagangan internasional serta strategi pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Organisasi non-pemerintah ini terus berkembang, sampai pada akhirnya pada tahun 1967 tercetus ide untuk membentuk lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan badan internasional, terutama PBB. Akhirnya, pada tahun 1970, atas rekomendasi PBB terbentuklah UNWTO sebagai organisasi internasional (Lestari, 2018).

UNWTO memiliki program-program pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pariwisata, dimana salah satu program yang diusung adalah Ekoturisme, sederhananya ini adalah sebuah konsep yang fokus pada wisata dan sekaligus kelestarian alam. (Lestari, 2018).

UNWTO juga membentuk *United Nations World Tourism Organization Framework Convention on Tourism Ethics* (UNWTO FCTE) yang mana UNWTO FCTE sebagai sebuah konvensi di tahap internasional untuk mempromosikan pariwisata yang inklusif, adil, dan transparan. UNWTO memberikan dukungan kepada sektor pariwisata dalam memajukan pengetahuan dan kebijakan pariwisata di seluruh dunia, mengadvokasi pariwisata yang bertanggung jawab dan mempromosikan pariwisata sebagai kekuatan pendorong menuju pertumbuhan ekonomi, pembangunan inklusif dan kelestarian lingkungan. Dengan keanggotaan 156 negara saat ini, UNWTO mendorong penerapan Kode Etik Global Pariwisata, untuk memaksimalkan kontribusi sosial-ekonomi pariwisata sambil meminimalkan kemungkinan dampak negatifnya. Oleh karena itu UNWTO menjadi norm entrepreneur yang berusaha meyakini masyarakat dunia untuk menerima norma yang ia bawa dengan berbagai program yang dibentuk, salah satunya dengan pembentukan UNWTO FCTE (UNWTO, 2017)

2.2 Motif

Martha dan Sikkink berpendapat bahwa ideasional dan komitmen merupakan motif yang utama dalam tahapan norm emergence dimana para entrepreneur percaya bahwa cita-cita, tujuan dan gagasan yang mereka sebarkan ke masyarakat merupakan norma yang benar.

UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak saat ini dan masa datang dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat (UNWTO, 2017) Aspek pertama yaitu Keberlanjutan lingkungan adalah syarat utama dalam melakukan pembangunan dan

sebagai keberlanjutan kehidupan karena keberlanjutan lingkungan dapat menjamin ekosistem bumi agar tidak terancam merusak lingkungan. Aspek kedua yakni keberlanjutan ekonomi agar kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Terakhir aspek ketiga yakni keberlanjutan sosial budaya yang didefinisikan sebagai keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup untuk seluruh manusia.

UNWTO berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara pariwisata dan keanekaragaman hayati dan menilai cara pariwisata dapat berkontribusi pada perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan perannya sebagai sumber daya utama untuk tujuan wisata. Adapun motif yang usung oleh UNWTO dalam membentuk UNWTO FCTE yaitu untuk melakukan promosi pariwisata berkelanjutan melalui dalam tahap organisasi internasional. Konvensi ini dilakukan agar pengembangan pariwisata dunia tetap memperhatikan kode etik dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan arahan konvensi, serta untuk menghilangkan argument negative bahwa sektor pariwisata dapat merusak lingkungan dan budaya lokal akibat derasnya nilai-nilai asing yang dibawa wisatawan mancanegara. Adanya konvensi ini akan menjadi sebuah alat tolak ukur dari gagasan Sustainable Tourism dan diikuti oleh Negara anggota anggotanya (Gibbons, 2020).

UNWTO bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan dapat diakses secara universal yang diarahkan pada pencapaian Agenda 2030 universal untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan motif

yang tertuang dalam pembentukan SDGs menjadi sebuah acuan dalam mempengaruhi konsep norma pariwisata berkelanjutan yang akan dibentuk oleh negara-negara yang menjadi anggota UNWTO sehingga isu terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi isu yang cukup populer yang pada akhirnya memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia dalam menerapkan norma yang dibawa oleh UNWTO dalam pengembangan berkelanjutan (SDGs).

2.3 Mekanisme Dominan

Diketahui bahwa norm entrepreneurs akan berusaha mempengaruhi negara secara persuasif dalam menyebarkan gagasan-gagasan atau norma yang dianut, dalam hal ini UNWTO meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara ASEAN untuk menerapkan norma pariwisata berkelanjutan dengan dirumuskannya ASEAN Tourism Strategic Plan yang merupakan strategi untuk mendorong negara-negara ASEAN meningkatkan perkembangan pariwisata yang terintegrasi yang dalam perkembangannya harus memperhatikan aspek inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga dimaksudkan untuk promosi norma kepada negara-negara ASEAN yang belum menerapkan konsep Sustainable Tourism pada perkembangan pariwisatanya, khususnya dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan.

ATSP menjadi mekanisme dominan untuk menjadi norma Bersama di ASEAN. ATSP memiliki dua visi utama yang harus dipenuhi. Yang Pertama, melakukan peningkatan daya saing pariwisata ASEAN dengan menjadi destinasi wisata terintegrasi. Sedangkan visi yang Kedua, memastikan bahwa pariwisata di ASEAN memperhatikan aspek inklusif dan keberlanjutan (Indonesia K. p., 2020). Tujuan lain dari dibentuknya ATSP ini agar Asia Tenggara menjadi daerah tujuan pariwisata berkualitas yang menyajikan keunikan, keanekaragaman budaya, dan

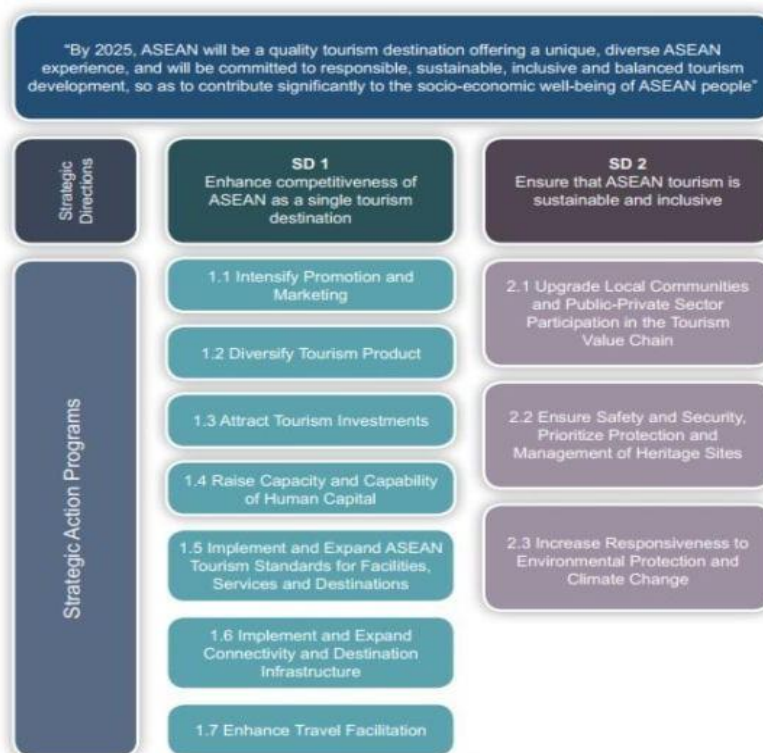
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pembangunan sektor pariwisata yang inklusif.

Pada awal terbentuknya ATSP, ASEAN Tourism Strategic Plan memiliki visi yang sejalan dengan tujuan dibentuknya UNWTO yaitu untuk menjadikan pariwisata ASEAN menjadi pariwisata yang terintegrasi. Namun dalam visi yang ditetapkan ASEAN Tourism Strategic Plan akan menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan juga dalam pembangunan melalui mengimplementasi Sustainable Tourism. Seperti yang kita ketahui ASEAN Tourism Strategic dibentuk untuk memajukan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pariwisata ASEAN serta memastikan bahwa perkembangan pariwisata ASEAN memperhatikan aspek inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, lingkungan dan budaya (Dini Septyana Rahayu, 2021).

ATSP II berfokus pada dua visi utama. Pertama, meningkatkan daya saing ASEAN dengan menjadi destinasi wisata terintegrasi. Kedua, memastikan bahwa pariwisata di ASEAN memperhatikan aspek inklusif dan keberlanjutan. Tujuan lain dari dibentuknya ATSP ini agar Asia Tenggara menjadi daerah tujuan pariwisata berkualitas yang menyajikan keunikan, keanekaragaman budaya, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pembangunan sektor pariwisata yang inklusif. Pada tanggal 30 Desember 2015 di Jakarta ASEAN menandatangani *Agreement on the Establishment of Regional Secretariat on the Implementation of MRATP* untuk mendukung pergerakan *tourism professional*. Terdapat sepuluh

program aksi yang diidentifikasi untuk implementasi yang dirancang untuk memberikan hasil dan dampak dari visi tersebut.

Gambar 8. Visi dan Arah Strategi dalam ASEAN Tourism Strategic Plan II (ATSP)



Sumber: asean

Gambar diatas menjelaskan 2 visi dan arahan strategi ATSP II. Arahan strategi I dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai tujuan pariwisata tunggal dan arahan strategi II untuk memastikan pariwisata ASEAN berkelanjutan dan inklusif. Arahan strategi II terbagi menjadi 3 poin. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari poin pertama adalah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di daerah pedesaan karena seringkali adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu arahan strategi II memberikan solusi bagi masyarakat pedesaan dengan pengembangan pariwisata dengan kebijakan dan kerangka kerja yang inklusif agar

mampu memberikan kontribusi ekonomi untuk komunitas pedesaan. Masyarakat yang masih jauh dari jangkauan ASEAN harus lebih banyak bergerak di bidang pariwisata secara langsung atau tidak langsung. Keterlibatan tersebut dengan cara menyediakan layanan fasilitas kepada wisatawan seperti *homestay* atau menjadi pemandu wisata. Sedangkan melalui cara tidak langsung dimana masyarakat memberikan masukan ke dalam pasokan pariwisata seperti produksi sayuran dan buah-buahan untuk restoran dan produksi kerajinan tangan untuk dijual sebagai oleh-oleh wisata.

Kedua, menjamin keselamatan, keamanan dan perlindungan aset. Dalam strategi ini bekerja sama dengan UNESCO untuk perlindungan aset wisata bersejarah. Pariwisata ASEAN sangat bergantung pada daya tarik alam dan budayanya yang unik karena terdapat sumber daya warisan yang telah diakui oleh UNESCO. Ketiga, perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Maksud dari arahan strategi ini yakni bekerja sama dengan organisasi yang bertugas untuk perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Perkembangan sektor pariwisata di dunia terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke ASEAN. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Asia Tenggara memiliki dampak positif bagi perkembangan kawasan ASEAN. Karena dengan berkunjungnya wisatawan ASEAN ke negara anggota lainnya dapat memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN sehingga ASEAN akan selalu dapat memperkokoh hubungan konektivitas. Penguatan hubungan antar negara anggota ASEAN sangat penting untuk masyarakat ASEAN sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ASEAN mengenai *people to people connectivity*

berfungsi untuk menyatukan masyarakat ASEAN dengan mempromosikan pemahaman sosial dan budaya intra-ASEAN yang lebih dalam dan meningkatkan mobilitas intra-ASEAN yang lebih besar.



BAB III

ANALISIS NORM CASCADE

3.1 Aktor

Aktor pada tahap norm cascade merujuk pada organisasi Internasional dan juga jaringan. Dalam hal ini salah satu organisasi Internasional yang berpengaruh dalam penyebaran norma *sustainable tourism* adalah Organisasi ASEAN yang berasumsi bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan kondisi yang harus ditingkatkan lagi, karena dengan adanya perkembangan pariwisata berkelanjutan masalah terkait kerusakan pada kelestarian wisata bisa berkurang, dan hal ini bisa dilakukan dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah dimana mereka turut ikut serta dalam menangani permasalahan yang ada maka dari itu kerusakan lingkungan wisata harus dihilangkan agar gagasan dari norma *sustainable tourism* dianggap penting diterapkan di suatu negara, selain untuk meningkatkan perekonomian negara dan menjaga kelestarian pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan terdapat dua aktor utama yaitu organisasi ASEAN dan negara Indonesia.

3.1.1 Organisasi Internasional ASEAN

Organisasi Internasional ASEAN menjadi aktor dalam analisis norm cascade karena organisasi ASEAN merupakan agen sosialisasi di Kawasan regional ASEAN dan telah membentuk beberapa kerja sama regional di dalamnya, khususnya dalam kerjasama pariwisata atau sering disebut ASEAN Tourism forum yang merumuskan strategi dalam meningkatkan kualitas pariwisata ASEAN ke dalam rezim Internasional ASEAN *Tourism Strategic Plan* yang diharapkan

mampu mengikat berbagai negara –negara ASEAN agar menerapkannya dalam kebijakan pariwisata domestik (Dini Septyana Rahayu, 2021).

3.1.2 Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia dijadikan aktor karena Indonesia sebagai anggota ASEAN sekaligus pelaksana kesepakatan di tingkat regional. Dalam hal ini Indonesia telah berkomitmen terhadap ATSP untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan di wisata bahari Indonesia, hal ini dapat dilihat dari upaya Kementerian Pariwisata yang telah membuat kebijakan terkait Perubahan pada rezim pariwisata internasional yang tertuang dalam ATSP 2016-2025, mendorong Indonesia merumuskan kebijakan baru yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan pada *project ten new Bali's*. (Sovia, 2019)

3.3 Motif

Pembahasan selanjutnya adalah motif dimana adanya penerimaan negara terhadap suatu gagasan atau norma yang didorong dengan adanya sebuah motivasi yang kuat dari negara itu sendiri dan dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara melihat identitas organisasi internasional. Oleh karena itu motif Indonesia menerima gagasan dalam ATSP untuk legitimasi norma yang disepakati di level ASEAN ke dalam regulasi domestik, selain itu juga sebagai upaya menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang menjalankan norma sustainable tourism.

3.3 Mekanisme Dominan

Penyebaran suatu norma melalui Organisasi Internasional, memerlukan sebuah mekanisme tertentu agar dapat diikuti oleh negara anggotanya, mekanisme

juga diperlukan dalam memperluas pengenalan norma. ASEAN sebagai aktor yang menyebarkan norma pariwisata berkelanjutan juga memiliki suatu mekanisme, dimana ASEAN menjadi fasilitator dalam penyebaran gagasan norma ke negara-negara anggota. Proses mekanisme tersebut dapat berupa konvensi, konvensi tersebut merupakan alat untuk mengikat pemerintah negara terhadap kepatuhan norma, proses ini memiliki dua tahapan yang pertama adalah proses penandatanganan, melalui proses ini menjadi tanda bahwa suatu negara sudah setuju dengan konvensi tersebut dalam hal ini negara mesti menghindari tindakan-tindakan apa yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada walaupun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban.

Sebagaimana negara-negara ASEAN yang ikut meratifikasi ASEAN Tourism Strategic Plan dalam rangka acara ASEAN Tourism Forum yang ke-35 diselenggarakan di Manila, Filipina, dimana telah hadir sepuluh menteri pariwisata ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Philipines, Laos, Myanmar, Thailand, Cambodia dan Singapura yang meluncurkan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) sebagai strategi dalam meningkatkan pariwisata yang tidak hanya untuk pengembangan dan pertumbuhan pariwisata Kawasan tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini didasarkan pada pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan inklusif. (Travelbiznews, 2016)

Selanjutnya adalah tahapan ratifikasi dan akses dalam tahapan sebelumnya pemerintah masih mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensi atau tidak dalam tahapan ratifikasi dapat dikatakan bahwa suatu negara telah menyetujui konvensi dan bersedia untuk patuh. Sehingga negara-negara yang sudah

menandatangani konvensi akan mempromosikan gagasan-gagasan dari konvensi yang telah disepakati yang agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mencari upaya untuk meningkatkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan pembangunan 10 Destinasi Prioritas atau 10 Bali Baru dengan konsep *sustainable tourism* yang sifatnya berkelanjutan dan inklusif. 10 Bali Baru merupakan makna kiasan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat publik tentang kekayaan alam dan budaya yang dimiliki setiap daerah wisata tersebut. Dengan tujuan setiap daerah destinasi bisa seperti Bali dalam waktu setahun mendapatkan kunjungan empat juta wisatawan mancanegara. Penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas “Bali Baru” merupakan amanat Presiden melalui surat Sekretariat/Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal tahun pada tanggal 4 Januari 2016 (Kornelia Johana D. S., 2020)

3.2.1 Sosialisasi

Melalui perumusan ASEAN Tourism Strategic Plan mempermudah ASEAN dalam mensosialisasikan norma pariwisata berkelanjutan dalam masyarakat negara, dengan mensosialisasikan kepada negara anggota ASEAN maka harapannya hal tersebut akan berdampak terhadap penanggulangan dari masalah pariwisata yang tidak bertanggung jawab, dan meningkatkan kualitas daya saing pariwisata ASEAN. ATSP 2016-2025 merupakan rezim pariwisata

internasional yang telah diikuti oleh seluruh negara anggota kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Rezim ATSP ini dirumuskan oleh ASEAN Tourism Forum yang merupakan bentuk dari kerjasama internasional pada sektor pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dalam penerapannya membutuhkan kontribusi dari masing-masing negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Melalui rezim ATSP ini dapat membantu negara anggota ASEAN dalam mempromosikan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata masing-masing negara agar dapat bersaing di dunia internasional. Dengan mengikuti beberapa arahan strategis pariwisata dalam ATSP, negara anggota ASEAN dapat mengambil kebijakan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di negaranya untuk merespon rezim ATSP ini (Dini Septyana Rahayu, 2021).

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi, dalam hal ini Indonesia meratifikasi konvensi yang berisi pada pengembangan daya saing pariwisata ASEAN yang harus memperhatikan aspek inklusif dan berkelanjutan dalam penerapannya, dalam hal ini Indonesia telah mengadopsi norma pariwisata berkelanjutan milik ATSP (Dini Septyana Rahayu, 2021). . Ratifikasi sendiri merupakan bentuk dari kesiapan Indonesia dan proses adopsi dari satu perjanjian, dalam hal ini Indonesia bertindak sebagai aktor yang turut menginternalisasikan norma pariwisata berkelanjutan dan berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk pengembangan pariwisata yang tidak menerapkan konsep keberlanjutan. Aktivitas Indonesia dalam dunia Internasional juga menjadi ciri bahwa Indonesia telah masuk dalam tahap internalisasi pada siklus norma, dimana Indonesia telah meyakini norma pariwisata berkelanjutan dan tidak lagi mempertanyakan

legitimasi norma tersebut, keyakinan negara Indonesia terhadap norma tersebut juga telah diadopsi dalam suatu kebijakan project Ten New Bali's sebagai alat Internalisasi norma, dimana pada tahap ini Negara akan melibatkan hukum, birokrasi, dan profesi untuk mencapai conformity.

3.2.2 Institusionalisasi

ASEAN Tourism Strategic Plan menjadi sebuah adopsi dalam ketetapan regulasi pemerintah Indonesia seperti memformulasikan kebijakan dalam program pengembangan 10 Bali baru sebagai kebijakan yang responsif terhadap penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk mengupayakan pengembangan pariwisata sebuah negara yang meliputi beberapa aspek utama, diantaranya aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk menciptakan kebutuhan masa kini, namun tidak mengurangi kebutuhan generasi di masa depan sehingga, mampu menciptakan masyarakat yang bisa berinteraksi satu sama lain dan bisa beradaptasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Arida, 2004).

Dalam proses Internalisasi suatu norma perlu adanya suatu produk hukum yang mengatur sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hukum bertujuan untuk sarana penggerak dalam internalisasi norma, dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan pada pengembangan program 10 bali baru yang sebagian besar tergolong wisata bahari, produk hukum yang menjadi acuan dalam hal ini ialah peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan (KEMENPAREKRAF, 2016). kebijakan ini menjadi alat dalam perumusan program kerja dalam pengembangan 10 bali baru yang berkelanjutan, dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap pengembangan destinasi wisata menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Untuk melakukan internalisasi norma yang ditetapkan dalam ATSP Kementerian Pariwisata telah berupaya membuat kebijakan terkait strategi pariwisata Indonesia selama empat tahun (2015 – 2019). Kebijakan tersebut yaitu program pengembangan daya saing pariwisata Indonesia yang pada akhirnya dibagi menjadi lima strategi dasar, sebagai berikut (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020);

- Pengembangan Destinasi dan Industri;
- Perluasan Pemasaran Pariwisata di Seluruh Dunia;
- Perluasan Pemasaran Pariwisata Nusantara;
- Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- Pengembangan Dukungan Manajemen

Dari kelima strategi yang diusung oleh kementerian pariwisata tersebut, penelitian ini akan berfokus pada kebijakan terkait pengembangan wisata bahari secara eksplisit. Dalam lima strategi pengembangan pariwisata yang tertera diatas, pemerintah memberikan kredit ekstra terkait pengembangan wisata bahari pada tiga sektor strategis melalui Pengembangan pada Destinasi dan Industri, Pengembangan terhadap Pemasaran Pariwisata Dunia, serta Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020).

a. Pengembangan Destinasi dan Industri.

Ada empat aspek pengembangan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia meliputi pengembangan ekosistem dan infrastruktur pariwisata, pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan, peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan industri pariwisata. Setiap aspek pengembangan destinasi dan industri pariwisata Indonesia memiliki fokus utama dan rencana strategis (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020).

Aspek pertama, pengembangan destinasi dan industri yang dilakukan dengan mengembangkan ekosistem dan infrastruktur pariwisata meliputi perencanaan destinasi pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional/KPPN) dan peningkatan aksesibilitas, daya tarik, amenities, dan ekosistem pariwisata. Pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata telah memberikan fasilitas kepada 34 provinsi dalam rangka pengembangan infrastruktur dan ekosistem. Ini menunjukkan kemajuan dan perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 28 provinsi yang difasilitasi (Kemenpar: 2016).

Rencana strategis lainnya juga ditempuh dalam rangka mencapai tujuan yaitu terselenggaranya kegiatan-kegiatan strategis lintas sektor pembangunan KSPN dan sinergi program yang dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait. Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam mengelola berbagai usulan keputusan dalam menentukan kawasan ekonomi khusus Pariwisata, koordinasi lintas sektor sebagai pendukung infrastruktur aksesibilitas dan amenities pariwisata dengan kementerian terkait. Dalam rangka meningkatkan dukungan dan sinergi antar sector, pemerintah telah melakukan pembangunan untuk aksesibilitas di 25 Kawasan Strategi Pembangunan Nasional dan 10 Destinasi Wisata Prioritas. Peningkatan terhadap aksesibilitas di 10 Destinasi Wisata Prioritas tersebut meliputi penetapan dan pengembangan pintu masuk kawasan pariwisata sehingga memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengakses kawasan wisata tersebut dengan lebih mudah.

Berikut ini dilampirkan 10 data pengembangan aksesibilitas Destinasi Wisata

Prioritas (Kemenpar, 2018):

Tabel 2. Peningkatan Aksestabilitas

No.	Destinasi Pariwisata Prioritas	Peningkatan Aksesibilitas
1	Toba	Perpanjangan landasan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, Pembangunan Jalan Tol Kuala Namu - Parapat.
2	Tanjung Kelayang	Peningkatan status Bandara HAS Hanandjoedin menjadi Bandara Internasional, peningkatan kualitas jalan akses dari Bandara menuju Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang.
3	Tanjung Lesung	Pembangunan Bandar Udara, Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Re-Aktivasi Jalan Kereta Api & Usulan Jalur Baru Rel KA.
4	Kepulauan Seribu - Kota Tua Jakarta	Perencanaan teknis dan pengurusan status Bandara Airstrip Pulau Panjang, peningkatan kapasitas 4 pelabuhan (Sunda Kelapa, Marina, Muara Angke, Muara Kamal), penambahan jumlah pelayaran / trip per day.
5	Borobudur	Ground breaking Bandara Kulon Progo, Peningkatan Bandara Ahmad Yani.
6	Bromo Tengger Semeru	Pengembangan Bandara Abdurrahman Saleh, peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan tol dan penghubung ke KSPN BTS dari Pintu Masuk.
7	Mandalika	Pengembangan Long Distance Ferry, BRT (Bus Rapid Transit), Jalan Raya Sengkol-Kuta,
8	Labuan Bajo	Perpanjangan landasan dan peningkatan fasilitas Bandara Komodo, Penambahan Direct Flight ke Labuan Bajo, pembangunan Kawasan Marina Wisata dan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo.
9	Wakatobi	Perluasan terminal dan perpanjangan runway Bandara Matohara di Pulau Wangi-Wangi, dan penambahan rute penerbangan langsung ke Wakatobi.
10	Morotai	Peningkatan bandara, pembangunan Pelabuhan Apung Daruba.

Sumber: Data Laporan kementerian pariwisata tahun 2016

Menurut data tersebut, menunjukkan kemajuan utama aksesibilitas di sektor wisata bahari Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan fokus pada 8 dari 10 destinasi prioritas yang berada di sektor wisata bahari dan peningkatan aksesibilitas juga telah ditekankan pada 8 dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia.

Aspek kedua merupakan pengembangan alam, budaya, dan wisata buatan. Fokus utama aspek ini adalah memajukan wisata spa dan kuliner, wisata religi dan sejarah, wisata kearifan lokal dan seni budaya, wisata desa dan kota, kemajuan wisata bahari, wisata jelajah dan ekologi, kawasan terpadu pariwisata, dan konvensional, wisata olahraga dan rekreasi. Untuk mendukung tujuan memajukan wisata alam, budaya, dan buatan, maka pemerintah menyusun beberapa rencana strategis untuk dilakukan. Sebuah data menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengembangkan 25 lokasi wisata alam, budaya, dan buatan yang meliputi (1) KSPN Nongsa – Pulau Abang, (2) KSPN Natuna, (3) KSPN Ijen-Baluran, (4) KSPN Gili Tramena, (5) KSPN Weh, (6) KSPN Toba, (7) KSPN Teluk Dalam-Nias, (8) KSPN Tanjung Kelayang, (9) KSPN Kota Tua - Sunda Kelapa, (10) KSPN Kep Seribu, (11) KSPN Borobudur, (12) KSPN Bromo-Tengger-Semeru, (13) KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua, (14) KSPN Kintamani-Danau Batu, (15) KSPN Menjangan-Pemuteran, (16) KSPN Rinjani, (17)) KSPN Pulau Komodo, (18) KSPN Ende-Kelimutu, (19) KPSN Sentarum, (20) KSPN Tanjung Puting, (21) KSPN Bunaken, (22) KSPN Toraja, (23) KSPN Wakatobi, (24) KSPN Morotai, dan (25) KSPN Raja Ampat (Kemenpar: 2016). Temuan lain adalah kenyataan bahwa sebagian besar pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan lebih memperhatikan wisata bahari. Di sisi lain, capaian yang telah dicapai oleh kemajuan wisata alam, budaya dan buatan adalah peningkatan jumlah kunjungan kapal pesiar dan kapal layar, penghargaan World Halal Tourism pada tahun 2016, peningkatan jumlah kunjungan wisata Geopark, dan peningkatan jumlah kunjungan yang mengunjungi destinasi wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) (Kemenpar, 2018).

Bagian ketiga merupakan pengembangan tata kelola destinasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada eskalasi tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya peningkatan sadar wisata, dan pengembangan kemampuan usaha masyarakat di bidang pariwisata. Pengembangan tata kelola terhadap destinasi pariwisata difokuskan pada 26 tempat wisata yang merupakan penambahan 2 tempat dari yang sebelumnya hanya terdiri dari 24 tempat. Penataan organisasi pengelola destinasi (Destination management Organisation/DMO), Penguatan terhadap sadar wisata, pengembangan kapasitas masyarakat, dan internalisasi sadar wisata merupakan bagian dari kegiatan strategi yang dilakukan untuk peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian terhadap pengembangan tata kelola destinasi pariwisata dirasakan dampaknya oleh provinsi Aceh di pulau Sabang, dimana pencapaian dari target dapat dikatakan melebihi 80%. Pulau Sabang hanya berfokus pada tiga komponen utama diantaranya Yacht, Cruise dan Diving. Awalnya, target yang ingin dicapai dari wisata Yacht ialah 34 kapal namun capaian yang berhasil diraih ialah 37 kapal (108%). Sedangkan wisata Cruise ditargetkan sebanyak 7 kapal namun pencapaiannya melebihi target yang diinginkan yaitu mencapai 10 kapal dan wisata diving ditargetkan sebanyak 4852 orang namun yang dicapai sebanyak 4235 orang (Indonesia, 2016).

Aspek keempat ialah pengembangan terhadap industri pariwisata yang dikonsentrasikan pada kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, perluasan sertifikasi dan standar usaha pariwisata, serta peningkatan terhadap keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di masing-masing destinasi pariwisata. Kinerja yang telah dicapai dalam pengembangan pariwisata dengan

basis investasi mencapai US\$1,253,88 juta atau 83% dari target awal. Namun, rencana strategis yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan industri pariwisata adalah penerapan orientasi hotel hijau, penyusunan Standar Nasional Indonesia Badan Usaha Jasa Pariwisata dan Sarana Pariwisata, fasilitasi penanaman modal usaha pariwisata, serta perluasan dan peningkatan tingkat keterampilan pekerja rumah tangga di sektor pariwisata (Kemenpar, 2018).

b. Pengembangan pemasaran pariwisata manca Negara

Pemasaran terhadap pariwisata mancanegara ditujukan agar terjadinya peningkatan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, hal ini dapat dicapai dengan promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, termasuk peningkatan terhadap citra pariwisata Indonesia, pengembangan strategi pemasaran pariwisata dan komunikasi yang selaras dengan fokus pasar berdasarkan kawasan dan pengembangan terhadap promosi produk wisata alam, budaya, dan buatan berdasarkan focus dan tuntutan pasar. Pada pengembangan Pemasaran pariwisata dunia dilakukan dengan menerapkan beberapa rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata meliputi Branding Wonderful Indonesia sebagai destinasi Utama wisata dunia melalui media elektronik untuk pasar luar negeri seperti Fof, MNC, Discovery channel, Google Indoneia, Amazing race, Trip Advisor, promosi pariwisata terpadu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta pemasaran pariwisata dengan pendekatan BAS, DOT, POS dan promosi wisata alam, budaya, dan buatan (wisata bahari) (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020).

c. Pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara

Pengembegan Pemasaran wisata nusantara diarahkan agar mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisata di Indonesia melalui pendekatan segmen

pasar personal, segmen pasar bisnis, dan pemerintah dengan mempromosikan tiga produk utama yaitu wisata alam, budaya dan buatan, wisata alam yang dimaksud seperti bahari, ekologi, dan wisata petualangan, wisata budaya seperti wisata heritage dan religi, kuliner dan belanja serta wisata kota dan desa, sedangkan wisata buatan itu seperti MICE, olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Perluasan terhadap strategi pemasaran pariwisata nusantara dimajukan dengan focus integrasi aspek pemasaran (DOT), Promosi (BAS), dan media (POS) (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020).

Kegiatan strategis yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata nasional pada tujuan pemasaran antara lain Branding Pesona Indonesia, mengintegrasikan setiap pemangku kepentingan di setiap lapisan masyarakat termasuk media digital dan non-digital seperti Metro, Kompas Group, MNC, juga peran serta BUMN/BUMD dan swasta. Promosi event di tempat-tempat wisata lokal akan menjadi bagian dari upaya pengembangan pariwisata pemerintah, yang melibatkan: Wisata Alam, seperti: Festival Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival Raja Ampat: Wisata Budaya, seperti: Festival Keraton Ambon, Festival Kuliner di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia: Wisata Buatan, seperti: Tour de Singkarak di Sumatera Barat, Jakarta Maraton: Wisata Bahari, seperti: Festival Bahari Tambora, Sail Karimata, Hari Peringatan Nusantara. Di sisi lain, kampanye Budaya Bahari juga terjadi dan berhasil menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai acara puncak Pekan Wisata Bahari di Indonesia Tengah atau Timur, belum lagi pengkodean dan pengembangan Strategi Pemasaran Nasional dan Segmentasi Pasar Wisatawan (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020)

BAB IV

ANALISIS NORM INTERNALIZATION PADA IMPLEMENTASI SUSTAINABLE TOURISM DI WISATA BAHARI INDONESIA

4.1 Aktor

Pada Bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut terkait peran aktor dalam internalisasi norma pariwisata berkelanjutan sebagai upaya mensejahterakan sektor wisata bahari di Indonesia pada kebijakan pariwisata berkelanjutan, hal ini akan diteliti menggunakan konsep norm Internalization milik Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink seperti yang telah dipaparkan pada bab 1, dimana dijelaskan bahwa pada tahap internalisasi aktor memiliki peranan yang sangat penting. Pembahasan ini akan terbagi menjadi dua, sesuai dengan aktor yang berperan dalam internalisasi menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yaitu, hukum, profesi dan birokrasi (Sikkink M. F., 1998).

4.1.1 Perangkat pemerintah

Selain itu kementerian pariwisata, dan kementerian ekonomi bergerak langsung untuk mengatur dan merancang masyarakat sekitar agar bisa menunjang penerapan pariwisata berkelanjutan dengan memanfaatkan situs warisan yang ada, serta membantu dalam pengemasan rantai pasok usaha wisata di daerah wisata, dst. Selain itu melakukan kerjasama dengan UNWTO, UNESCO dan organisasi internasional lainnya, dengan melakukan kerjasama bilateral dengan negara sahabat (UNWTO, 2017)

kementerian pariwisata mendorong masyarakat membentuk pokdarwis. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dan turut menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai (rahim, 2012)

“upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”

Pada tahun 2020 Indonesia telah membentuk Indonesia Sustainable Tourism Council yang merupakan dewan kepariwisataan berkelanjutan yang sudah ditunjuk melalui keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, fungsi dari ISTC adalah memberikan arahan kebijakan, advokasi pemikiran, mendorong pengembangan kode etik kepariwisataan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, mengontrol dan monitoring kualitas program Sustainable Tourism Development, serta melakukan evaluasi rekomendasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di segala pilar kepariwisataan (Mandiri, 2021).

Sustainable Tourism Council dibentuk saat itu tentu untuk mendukung peningkatan dalam penerapan pariwisata berkelanjutan, pada saat pembentukan secara resmi kebijakan dalam pengembangan program 10 bali baru juga turut

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Dengan adanya pembentukan badan pariwisata berkelanjutan dalam birokrasi pemerintah Indonesia tentu akan mendukung proses internalisasi norma pariwisata berkelanjutan. Kementerian kelautan dan perikanan juga sedang mencoba memperkenalkan konsep kawasan konservasi laut yang mengintegrasikan sumber daya arkeologi laut atau warisan budaya bawah laut seperti bangkai kapal purba, situs, ekosistem lingkungan. Tujuan Dibentuknya kawasan konservasi maritim adalah untuk melindungi potensi sumber daya arkeologi laut dengan perlindungan hukum oleh undang-undang. Setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim, lokasi kapal karang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari yang berpotensi khususnya sebagai lokasi untuk menyelam. (Ridwan, 2012).

Disini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi aktor yang melegitimasi norma yang diadopsi dan membuat produk kebijakan sehingga dalam tahapan ini aktor yang berperan adalah kementerian pariwisata, kementerian ekonomi kreatif dan juga sustainable tourism council yang akan menginternalisasikan norma yang bertujuan untuk mencapai conformity norma yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

4.2 Motif

Setiap norma memiliki standarnya masing-masing begitu juga dengan norma sustainable tourism dalam ATSP sehingga dibutuhkan kesesuaian dalam pengimplementasinya, oleh karenanya dalam pengembangan wisata bahari Indonesia perlu disesuaikan dengan regulasi yang tertera dalam norma sustainable

tourism, dengan memenuhi kebutuhan untuk memastikan bahwa pariwisata tidak menciptakan dampak negatif kepada masyarakat sekitar destinasi. Dengan motif menginternalisasikan norma yang bertujuan untuk mencapai conformity norma yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Kesesuaian ini dapat dilihat dari peningkatan dan perubahan yang terjadi dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang mengutamakan norma pariwisata berkelanjutan.

4.3 Mekanisme Dominan

Mekanisme dominan dalam siklus internalisasi adalah kebiasaan dan institusionalisasi, kebiasaan ini diambil dari kebiasaan masyarakat, juga para aktor yang terlibat dalam internalisasi norma. Menyebarkan nilai-nilai dari norma Sustainable Tourism yang memerlukan sebuah mekanisme agar norma dapat terinternalisasi dengan baik, hal tersebut tentunya bisa dilihat dengan kebiasaan masyarakat terhadap norma atau gagasan yang diinternalisasikan, dalam penelitian kali ini adalah Indonesia mengupayakan norma atau stereotip pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan 10 bali baru.

4.3.1 Kebiasaan

Perkembangan terhadap 10 bali baru yang menerapkan konsep sustainable tourism memberikan dampak pada kapasitas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan dibentuknya program yang mengikutsertakan masyarakat setempat. Dalam hal ini meningkatkan pelibatan komunitas lokal dan partisipasi sector public-swasta dalam rantai nilai pariwisata, hal ini dilakukan oleh masyarakat dengan mengupayakan pembangunan desa wisata dan homestay di Bali Baru. Mereka dituntun oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa (Kemendes), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

perguruan tinggi. Dari sektor publik, terdapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM), dan BUMN, berupa usaha binaan dan akses pasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan dalam bentuk pengembangan infrastruktur. Adapun Kemendes memberikan bantuan berupa peningkatan SDM, sadar wisata, dll. Sedangkan dari swasta berupa kerja sama joint sponsorship, kegiatan hibah CSR (Fery Kurniawan, 2016).

Penegmbangan 10 Bali baru menerapkan pariwisata berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) (Teknik, 2020) sebagai kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya. Wujud dari konsep *Community Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat dengan dikembangkannya desa-desa wisata, di mana masyarakat desa ikut dilibatkan dalam mengenali dan mengembangkan potensinya, baik yang berupa sumber daya alam, budaya, maupun sumber daya manusianya. kemudian intervensi Kemenpar adalah pembangunan yang berlandaskan bottom up. Bottom up adalah masyarakat yang menentukan, bukan paksaan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Masyarakat yang harus membangun dan tugas pemerintah adalah mendampingi dan membantu. (Dini Septyana Rahayu, 2021). Pada saat itu masyarakat memulai langkah-langkah dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia yang memperhatikan aspek inklusif dan berkelanjutan. Dimana masyarakat Indonesia mulai ikut berpartisipasi dalam pengemangan destinasi 10

Bali Baru yang menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 10 Bali baru dapat dilihat dari penyediaan akomodasi penginapan homestay. Sesuai dengan definisinya, homestay menjadi jenis akomodasi penginapan sederhana yang memanfaatkan rumah tinggal masyarakat lokal untuk digunakan atau disewa oleh wisatawan dalam waktu sementara. Dengan adanya homestay di desa wisata, pemilik rumah dapat secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan. Sedangkan dalam aspek sosial budaya memiliki dampak yang positif setelah adanya *project ten new Bali's* karena tercipta kembali tradisi gotong royong antar masyarakat, musyawarah desa, hidup kembali local wisdom, serta kesenian dan adat daerah terangkat kembali termasuk kuliner dari setiap destinasi (Arida, 2004)

Oleh karena itu kebiasaan dimana masyarakat lokal terbiasa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang memiliki landasan norma pariwisata berkelanjutan. Dan dalam keikutsertaan masyarakat tersebut memberikan kesadaran akan manfaat dari pariwisata berkelanjutan secara ekonomi. Akan tetapi kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan masih kurang melihat kondisi lingkungan wisata bahari di 10 Bali baru belum terjaga dengan baik kelestariannya.

4.3.2 Institusionalisasi

Untuk menginternalisasi Sustainable Tourism pada wisata bahari Indonesia, pemerintah melakukan beberapa monitoring terhadap perkembangan pariwisata agar sesuai dengan kebijakan dan memastikan bahwa mekanisme yang dijalankan sesuai dengan norma sustainable tourism diantaranya, adanya peraturan wisata kapal selam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Wisata Selam, Peraturan ini mengatur bisnis wisata selam, sertifikasi, serta supervisi dan sanksi administratif tertentu.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi Peraturan ini menetapkan bahwa setiap kegiatan menyelam rekreasi dilakukan sesuai dengan Pedoman untuk Kegiatan Selam Rekreasi yang disajikan sebagai Lampiran dalam peraturan ini (Haiyyu Darman Moenir A. H., 2020).

Selain itu KEMENPAREKRAF melakukan perkembangan destinasi dan atraksi dengan Mendukung pelaksanaan sertifikasi pemandu wisata selam di daerah wisata selam. Melakukan sosialisasi terkait pedoman penyelenggaraan wisata selam rekreasi . Mendukung penyelenggaraan event selam, Menyusun diving sites directory, Mendukung pembuatan paket wisata selam. Selain itu kemenparekraf melakukan pengembangan pemasaran dengan Memasarkan destinasi-destinasi wisata selam serta Berpartisipasi pada pameran selam internasional. Kemenparekraf juga mendukung pembuatan paket wisata cruise Berkoordinasi dengan K/L lain dalam mendukung pengembangan wisata cruise. Dalam hal regulasi regulasi pemasaran dengan Berpartisipasi pada pameran cruise internasional, Berkolaborasi dengan cruise lines dan cruise operators internasional, Menjalin kerjasama (MoU) dengan negara Singapura untuk meningkatkan cruise traffic ke Indonesia, Pembuatan website cruise untuk memuat informasi terkait wisata yacht di Indonesia. Selain itu untuk Pemulihan Destinasi wisata bahari Kemenparekraf berkolaborasi dengan Divers Clean Action (DCA) dalam kegiatan Revitalisasi Bumi Aksi Bersih Pantai (Kornelia Johana D. S., 2020).

Beberapa aksi nyata telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengembangan pada 10 Bali Baru, diantaranya adalah pemerintah membangun Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo untuk mendorong perkembangan wisata di Borobudur. Bandara ini dapat melayani 66 penerbangan dengan jumlah 3 juta penumpang. Sementara untuk destinasi lainnya yaitu Mandalika dengan pembangunan Sirkuit MotoGP yang dimulai pada Oktober 2019 yaitu acara yang dibuat pemerintah agar dapat mempromosikan destinasi Mandalika. (Hans, 2021)

Selanjutnya pada destinasi tanjung lesung yaitu adanya festival tanjung lesung dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Festival Tanjung Lesung dimulai pada 27-29 September 2019 yang menghadirkan dua acara utama: Rhino Cross Triathlon, yang merupakan lomba triathlon yang ketiga kalinya. Rhino Cross Triathlon juga merupakan lintas alam pertama di Indonesia, yang terdiri dari lomba berenang, balap sepeda, dan lari. Lomba ini melintasi keindahan alam yang justru menjadi tantangan alam di Tanjung Lesung (Setiawan, 2019)

Pada destinasi Wakatobi adanya festival di Wakatobi tanggal 19-22 Oktober 2017 yang termasuk dalam event Wonderful Sail 2017. Wilayah Wakatobi merupakan destinasi yang kaya akan potensi wisata baharinya. Sehingga dengan adanya festival wakatobi untuk mempromosikan wisata bahari ini agar lebih gencar, lebih masif dan lebih mendunia. (Putra, 2021)

Festival Kepulauan Seribu acara yang diadakan oleh masyarakat setempat yang bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah dengan tujuan tidak lain untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Kepulauan Seribu. Festival yang dapat

dikunjungi dengan budget yang minimal namun dapat menikmati keindahan alam dan budayanya. (traveling, 2021)

Festival Morotai di Maluku Utara. Pulau Morotai merupakan satu museum besar Perang Dunia II. Daerah ini memiliki ciri khas yakni masyarakat yang menyukai tarian dan nyanyian. Sehingga banyak event yang diadakan tiap akhir pekan sehingga akan memberikan dampak positif bagi pendapatan masyarakat. festival morotai merupakan festival yang dibuat untuk mengenalkan pesona Indonesia Timur dari sisi alam budaya dan masyarakatnya (Dimiyanti, 2021)

Festival Tanjung Kelayang dengan latar belakang keindahan Pulau Belitung. Festival ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangkitkan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan pariwisata (belitung, 2021)

Adapun aksi nyata dari pemerintah Borobudur yaitu Borobudur Marathon. Borobudur marathon adalah manifestasi dari irama berbeda yang berkolaborasi menjadi satu antara panitia, pemerintah, sponsor dan orang-orang lokal yang mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk menyambut pelari dari seluruh dunia untuk menikmati lomba yang luar biasa. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. (maraton, 2021)

Destinasi lainnya pada destinasi danau toba dengan mengadakan Festival Danau Toba Sumut. Merupakan event yang telah dilaksanakan sejak tahun 1970 sebagai acara untuk mempersatukan seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara agar berkontribusi meratakan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (pariwisata, 2021)

Taman nasional gunung bromo merupakan wisata yang telah dikenal oleh wisatawan domestik dan wisatawan asing. Upacara Yadnya Kasada merupakan

sebuah upacara yang diselenggarakan oleh suku tengger dan menjadi upacara yang paling menarik perhatian wisatawan. Wisata budaya ini dilakukan karena turunan dari nenek moyang. Dengan tujuan agar suku tengger dapat melestarikan budaya lokal (Rachmat Isa, 2014)

Pada tahun 2017 Indonesia melakukan Kampanye Wonderful Indonesia di seluruh dunia dan mendapat pengakuan Global. Dimana Indonesia menerima penghargaan di 13 negara. Dalam melanjutkan pengembangan destinasi kempar kembali pada tahap pengembangan 10 Bali baru atau 10 destinasi prioritas diantaranya Danau Toba, Tnajung Lesung, Tanjung Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Morotai, kepulauan Seribu, dan kota Tua Jakarta, Bromo-tengger-semeru, mandalika dan Labuan bajo. Dengan menggunakan startegi dengan berfokus pada 3A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (S, 2018).

Dari beberapa aksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif telah melakukan berbagai upaya agar penerapan norma pariwisata berkelanjutan sesuai dengan ketetapan dari norma pariwisata berkelanjutan yang adopsi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata melalui kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menjadi solusi dari krisis ekonomi Indonesia akibat dari pariwisata yang kurang bisa bersaing di dunia internasional. Dimana kebijakan tersebut memanfaatkan kelestarian alam wisata bahari yang berkualitas, hal tersebut tentu untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan baik dari sektor ekonomi, lingkungan dan budaya sosial.

Program pengembangan 10 bali baru memiliki tujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, tujuan tersebut dirangkum menjadi 3 aspek diantaranya, meningkatkan ekonomi pariwisata, melindungi kelestarian lingkungan wisata dan mempertahankan budaya wisata. *Sustainable tourism* masuk dalam tujuan reformasi struktural. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang ikut meratifikasi *ASEAN Tourism Strategic Plan* sebagai acuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. ATSP juga dijadikan alat reformasi struktural bagi Indonesia untuk menginternalisasikan norma pariwisata berkelanjutan dalam kebijakan nya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui penggunaan konsep tahapan internalisasi norma dalam siklus norma yang dipelopori oleh Finnemore

dan Sikkink, dimana dalam tahapan tersebut mempunyai tiga sub variabel utama, yaitu aktor, mekanisme dominan, dan motif. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab rumusan masalah terkait “Bagaimana Implementasi *Sustainable Tourism* dalam ASEAN Tourism Strategic Plan di wisata bahari Indonesia ? “

Tabel 3. Hasil Analisis

	Norm Emergence	Norm Cascade	Norm Internalization
Aktor	UNWTO dan UNWTO FCTE merupakan aktor pada tahapan ini karena mendorong penerapan kode etik global pariwisata dan memaksimalkan kontribusi dalam ekonomi pariwisata dan meminimalkan dampak negative yang terjadi serta mengangkat isu sebagai sebuah alat	Organisasi ASEAN merupakan antro pada tahap ini karena asean sebagai agen sosialisasi kesepakatan di Kawasan regional. Selain itu Pemerintah Indonesia juga menjadi aktor pada tahap ini karena Indonesia sebagai	Perangkat pemerintah diantaranya : Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki peran dalam melegitimasi norma sustainable tourism dan membuat produk kebijakan yang sesuai. Serta sustainable Tourism council yg merupakan dewan yang dibentuk untuk Mendukung

	dalam menyebarkan norma .	Anggota ASEAN sekaligus pelaksana kesepakatan di tingkat regional	peningkatan dalam pariwisata berkelanjutan
Mekanisem dominan	ASEAN Tourism Startegic Plan menjadi mekanisme dominan untuk menjadi norma Bersama di ASEAN. Sehingga negara-negara yang ikut meratifikasi ATSP juga ikut sepakat dengan norma yang ditetapkan.	ASEAN menjadi fasilitator dalam penyebaran norma Sustainable Tourism pada negara anggotanya, dan mensosialisasikan norma pariwisata kepada masyarakat negara termasuk Indonesia, dimana Indonesia menandatangani ketetapan dalam ATSP .	Kebiasaan: Program pengembangan pada 10 bali baru dengan Membiasakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pengembangan pariwisata, sehingga Kementerian Pariwisata Membentuk <i>Community based Tourism</i> . Program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam Agenda

			<p>pengembangan pariwisata akan memunculkan kebiasaan masyarakat setempat. Dan berdampak pada perubahan kebiasaan baik dari profesi pekerjaan, maupun perilaku</p> <p>Institusionalisasi: Kementrian pariwisata dan Ekonomi kreatif melakukan monitoring terhadap perkembangan pariwisata agar sesuai dengan kebijakan dalam penerapan norma sustainable tourism. Dengan dibentuknya pertauran nomor 15</p>
--	--	--	---

			<p>tahun 2014 tentang standar usaha wisata</p> <p>Selam dan peraturan nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata selam rekreasi.</p> <p>Dan masih banyak lagi aksi monitoring yang dilakukan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
Motif	<p>Dengan pembentukan agenda 2030 universal untuk pembangunan berkelanjutan (SGDs) membentuk sebuah motif dalam mempengaruhi konsep norma pariwisata</p>	<p>Motif Indonesia menerima gagasan dari ATSP sebagai legitimasi norma yang disepakati di level ASEAN ke dalam regulasi domestik selain itu sebagai upaya menjaga reputasi Indonesia sebagai</p>	<p>Motif dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan karena sesuai dengan kebutuhan pariwisata Indonesia, ini dapat dilihat dari</p>

	berkelanjutan disuatu Kawasan regional.	negara yang menjalankan norma sustainable tourism	peningkatan dan perubahan yang terjadi pada perkembangan wisata bahari di Indonesia.
--	--	--	--

5.2 Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti, dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dalam penyusunan, dimana diantaranya keterbatasan penelitian yang menyebabkan diskusi penelitian hanya berfokus pada Indonesia. Oleh karena itu dari kekurangan dalam penyusunan, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya menjelaskan atage of norms dalam penerapan norma Sustainable Tourism lain di beberapa wilayah Asia sehingga hal tersebut bisa menjadi pembanding dalam melihat bagaimana proses Internalisasi norma-norma di negara-negara Asia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, N. S. (2004). *Pariwisata berkelanjutan*. Bali: Sustain-Press.
- ASEAN, D. S. (2017). *ASEAN selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Sekretariat jenderal kerja sama ASEAN.
- Atikah Nurhayati, I. A. (2019). Model Development of A Synergistic Sustainable Marine Ecotourism-A case study in Pangandaran Region, West Java Province, Indonesia. *Sustainability*, 1-14.
- Azzahratul, K. (2020). *Diplomasi Digital Indonesia dalam memperkenalkan destinasi pariwisata 10 bali baru*. Malang: Universitas Muhamadiyah malang.
- belitung, D. p. (2021, Januari 18). *pengumuman pemenang lomba vlog festival tanjung kelayang*. Retrieved from [dispar.belitungkab.go.id: https://dispar.belitungkab.go.id/read/641/pengumuman-pemenang-lomba-vlog-festival-tanjung-kelayang-2018](https://dispar.belitungkab.go.id/read/641/pengumuman-pemenang-lomba-vlog-festival-tanjung-kelayang-2018)
- BSN, H. (2019, September 27). *Badan Standardisasi Nasional*. Retrieved from Sertifikasi Destinasi Pariwisata demi mewujudkan pariwisata berkelanjutan: <https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/07/indonesia-percepat>
- DAP, L. A. (2016). Efektifitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia . *Jurna Analisis Hubungan Internasional*, 258-266.
- Dimiyanti, V. (2021, Januari 18). *Keunikan festival morotai 2019, tampilan monumen perang dunia II*. Retrieved from [inews.id: https://www.jababekamorotai.com/inews-id-keunikan-festival-morotai-2019-tampilkan-monumen-perang-dunia-ii/](https://www.jababekamorotai.com/inews-id-keunikan-festival-morotai-2019-tampilkan-monumen-perang-dunia-ii/)
- Dini Septyana Rahayu, D. S. (2021). Implikasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025 dalam pengembangan project Ten New Bali's Indonesia. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 249-227.
- Endiyanto Yoga Prasetyo. (2019, Januari 10). *Pajak Lingkungan Hidup, Andalan Baru Jokowi*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/pajak-lingkungan-hidup-andalan-baru-jokowi-15650>
- Fery Kurniawan, L. A. (2016). Vulnerability assesment of small islands to tourism: the case of the marine tourism park of the gili matra islands,Indonesia. *Global Ecology and conservation*, 306-326.
- Gibbons, Z. (2020, Oktober 06). *Indonesia ingin jadi pionir pariwisata berkelanjutan pasca covid-19*. Retrieved from Antara Bali: <https://bali.antaranews.com/amp/berita>
- Haiyyu Darman Moenir, A. H. (2020). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) Dalam Kebijakan Pariwisata Bahari Indonesia . *Jurnal PIR : Power In International Relation* , 166-189.
- Haiyyu darman Moenir, A. H. (2020). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan dalam kebijakan pariwisata Bahari Indonesia. *Jurnal PIR*, 167-187.
- Haiyyu Darman Moenir, A. H. (2021). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) dalam Pengembangan pariwisata Sumatra Barat. *Jurna Kepariwisataan Indonesia: Jurnal penelitian dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia* ., 49-63.

- Halim, H. D. (Februari 2020). Impelementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) dalam Kebijakan Pariwisata Bahari Indonesia. *Jurnal PIR Vol.4 No.2*, 166-189.
- Hans, H. (2021, February 18). *Cerita Akhir Pekan*. Retrieved from Potensi dan perkembangan wisata di 5 Bali Baru: liputan6.com
- Indonesia, K. P. (2012). *Rencana Strategi Pariwisata Berkelanjutan dan Green jobs untuk Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization.
- Indonesia, K. p. (2016). *Akuntabilitas kinerja kementerian pariwisata tahun 2016*. Jakarta: Kementerian pariwisata dan Ekonomi kreatif Republik Indonesia.
- Indonesia, K. p. (2020, Juli 07). *Rencanan strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata kementerian pariwisata tahun 2015-2019*. Retrieved from Kementerian Pariwisata Republik Indonesia: [www. Kemenpar. go. id](http://www.kemenpar.go.id)
- Indonesia, P. p. (2021, April 23). *Kontan.co.id*. Retrieved from Wujudkan sustainable tourism, ITDC hadirkan moda transportasi ramah lingkungan: <https://amp.kontan.co.id/release/wujudkan-sustainable-tourism-itdc-hadirkan-moda-transportasi-ramah-lingkungan-di-the-nusa-dua>
- Katja. (n.d.). *The Importance of Tourism in Any Country - Economy, Infrastrukture & Business Opportunities*. Retrieved from <https://traveltractions.com/importance-of-tourism-types/>
- Kemenpar. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata*. Retrieved from www.kemenpar.go.id.
- KEMENPAREKRAF, s. J. (2016, September 01). *JDIH kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif*. Retrieved from Peraturan Menteri pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan: <https://jdih.kemenparekraf.go.id/katalog-40-Peraturan%20Menteri>
- Kornelia Johana, D. S. (2020). Strategi komunikasi pemasaran 10 destinasi pariwisata priorita " 10 Bali baru" Di Kemntrian Pariwisata Republik Indonesia. *Jornal Ekonomi dan Manajemen*, 632.
- Kornelia Johana, D. S. (2020). strategi komunikasi pemasaran 10 destinasi pariwisata prioritas 'bali baru' di kementerian pariwisata republik Indonesia. *jurnal ekonomi dan menejeman sistem informasi*, 632.
- Kurniawan, R. (2013). kebijakan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata. *society jurnal pendidikan IPS Edisi IX*, 66-67.
- Mandiri, I. (2021, Juli 01). *Menuju Indonesia Mandiri*. Retrieved from Indonesia percepat penerapan Pariwisata Berkelanjutan Di tanah Air: <https://www.indonesiamandiri.web.id/2021/07/indonesia-percepat>
- maraton, B. (2021, Januari 18). *Rhythm of soul*. Retrieved from borobudurmarathon.com: <https://borobudurmarathon.com/id/>
- Moi, S. A. (2017). Implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam Rangka ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 terhadap pengelolaan Pariwisata di Labun Bajo . *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* , 123-132.
- Neuman, W. L. (2014). *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* . Amerika: United State Of America.
- News, V. (2012, juni 4). *keunggulan wisata malaysia dari Indonesia*. Retrieved from 10 Keunggulan Wisata Malaysia dari Indonesia:

- <https://www.viva.co.id/arsip/320516-11-keunggulan-wisata-malaysia-dari-indonesia>
- pariwisata, D. k. (2021, Januari 18). *Festival danau toba sumut*. Retrieved from Disbudpar.smutprov.go.id:
<http://disbudpar.sumutprov.go.id/event/festival-danau-toba-sumut-2019/>
- Pernando, A. (2015, Agustus 29). *Anggaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di RAPBN 2016 melonjak 109%*. Retrieved from Bisnis.com:
<https://m.bisnis.com/amp/read/20150829/12/467035/anggaran-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-di-rapbn-2016-melonjak-109>
- Pitanatri, P. D. (2019). Override Parade : Isu-isu pariwisata berkelanjutan pada destinasi kepulauan di Indonesia. *Media Wisata*, 132-144.
- Putra, Y. M. (2021, Januari 18). *Event spektakuler dongkrak wakatobi sebagai wisata bahari dunia*. Retrieved from republika.co.id:
<https://m.republika.co.id/amp/oot17d284>
- Rachmat Isa, M. B. (2014). Perancangan Buku Esai Fotografi Potrait Upacara Yadnya Kasada Gunung Bromo Suku Tengger Sebagai Upaya Untuk Melestarikan Budaya Lokal. *Desain Komunikasi Visual*, 24.
- rahim, F. (2012). *Buku pedoman kelompok sadar wisata*. Jakarta: Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Ramadhani, M. (2018, November 02). *10 bali baru Genjot drvisa negara tahun depan*. Retrieved from Republika.co.id:
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.cp.id/amp/phjsku328>
- Ridwan, N. N. (2012). Marine Archaeological resources in Indonesian waters as marine tourism destination, case studies, liberty wreck in Tulamben, Bali and BoeloenganNederlandsin Mandeh Bay, west Sumatra. *Industrilazation of fisheries and marine resource*, 1-5.
- S, U. (2018, Januari 26). *Info Publik*. Retrieved from Ini di progres ASEAN one single destination of Sustainable tourism:
<https://infopublik.id/read/245179/ini-dia-progress-asean-one-single-destination-of-sustainable-tourism.html>
- Setiawan, B. (2019, September 28). *Festival Tanjung Lesung dimulai, Bukti pariwisata Banten pulih*. Retrieved from Tempo.co:
<https://travel.tempo.co/amp/1253552/festival-tanjung-lesung-dimulai-bukti-pariwisata-banten-pulih>
- Sikkink, M. F. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change*. Autum: MIT press.
- Sikkink, M. F. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 887-917.
- Sovia, I. D. (2019, Desember 29). *Teori Rezim Internasional , Feminisme dan teori non-barat dalam hubungan Internasional*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=gwIG1WwRe-M&t=263s>
- Sulistiawati, D. (2020, Desember 15). Analisis kebijakan madya pada pariwisata. (D. Axioma, Interviewer)
- Sunario. (2007). *Daya Saing Pariwisata Dunia tahun 2007 melalui the world economy forum*. Jakarta: media Indonesia.
- Supriyanto, B. (2017, September 28). *Bisnis.com*. Retrieved from ITDC Raih Green Platinum Indonesia Sustainable Tourism Awards 2017:

<https://m.bisnis.com/amp/read/20170928/224/693989/itdc-raih-green-platinum-indonesia-sustainable-tourism-award-2017>

Teknik, P. E. (2020, Januari 4). *ETICON*. Retrieved from Membangun Pariwisata Bersama masyarakat: <https://eticon.co.id/pembangunan-pariwisata-berbasis-masyarakat/>

traveling, P. s. (2021, Januari 18). *festival di kepulauan seribu paling seru dan menyenangkan*. Retrieved from pulauseribu.co.id: <https://pulauseribu.co.id/festival-di-kepulauan-seribu-paling-seru-dan-menyenangkan/>

UNWTO. (2017). Tourism for sustainable development gudebook. *Enhancing capacities for sustainabel tourism for development in developing countries*, 12.





